

### BAB III

## SUAMI MAFQUD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

### MENURUT HUKUM PERDATA

#### A. Pengertian Mafqud

Keadaan tidak hadirnya seseorang dalam hukum perdata disebut dengan istilah *afwezig* atau *afwezigheid*

Istilah ketidak hadiran (*afwezigheid*) sebenarnya tidak begitu tepat untuk digunakan sebagai istilah hukum, oleh karena masih perlu ditambahkan keterangan lebih lanjut mengenai definisi ketidak hadiran itu. Suatu ketidak hadiran dalam jangka waktu pendek kurang relevan jika dianggap sebagai ketidak hadiran dalam arti yuridis (R. Soetojo Prawirohamidjojo, Martalena Pohan, 1995:242).

Pasal 463 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa ketidak hadiran seseorang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Meninggalkan tempat kediamannya;
- b. Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya;
- c. Tidak menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya;

- d. Kuasa yang pernah diberikan telah gugur;
- e. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengelolaan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian;
- f. Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidak hadirannya tersebut;
- g. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Sebagai contoh misalnya, bertindak sebagai wakil dalam suatu proses perceraian.

Jadi seorang tak hadir (*afwezig*) menurut undang-undang ialah jika ia meninggalkan tempat tinggalnya sedang ia tidak sempurna mewakilkan kepentingannya pada seseorang (Tan Thong Kie, 1987:53).

Ketidak hadirannya (*afwezigheid*) dapat bersama-sama dengan tidak diketahuinya tempat di mana beradanya orang yang tidak hadir itu dan dapat diragukan pula kembalinya karena sudah daluwarsa dan karena terjadinya peristiwa-peristiwa seperti perang, kecelakaan laut dan lain sebagainya (Vollmar, 1990:109).







dari orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, apabila ia datang kembali (Vollmar, 1990:111).

Penggolongan masa yang dilontarkan oleh para ahli tersebut dimaksudkan agar dalam melakukan tindakan terhadap orang yang hilang tidak boleh dilakukan secara frontal, akan tetapi harus melalui tahap-tahap waktu yang telah ditentukan, karena keberadaan orang yang hilang tersebut masih kabur, sehingga sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ia masih dalam keadaan hidup.

C. Suami Mafqud Sebagai Alasan Perceraian Dalam Hukum Perdata

Mengenai orang yang bepergian cukup lama tanpa khabar berita yang pasti apakah orang yang bepergian itu masih hidup atau sudah meninggal dunia (dalam hukum Islam disebut mafqud). Hal ini diatur dalam pasal 463 dan seterusnya pada titel 18 buku I BW (Sution Usman Adji, 1989:52).

Selanjutnya mengenai bepergian tanpa khabar ini pada dasarnya dari peraturan BW tersebut adalah apabila seorang yang bepergian cukup lama dan tidak memperhatikan segala keperluan bagi yang ditinggalkan, maka dalam hal

ini dianggap perlu untuk diadakan suatu tindakan yang berturut-turut, antara lain :

- a. Tindakan sementara dari Pengadilan Negeri sebagai suatu tindakan untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan yang disebabkan oleh kepergian seorang itu, akan terlantar terutama mengenai harta benda milik orang yang bepergian itu serta barang-barang lainnya yang tidak diurusnya sama sekali.
- b. Pemutusan oleh Pengadilan Negeri, bahwa orang yang bepergian itu dianggap sekiranya sudah meninggal dunia.

Maka keputusan Pengadilan Negeri yang tersebut pada sub b di atas, adalah terdapat suatu hubungan dengan hal penghentian perkawinan.

Pada pokoknya ialah apabila hakim menetapkan bahwa orang yang bepergian itu sekiranya sudah meninggal dunia, maka hal ini pada hakekatnya mempunyai akibat seperti wafatnya seseorang, dengan demikian dapat dianggap terputus mengenai perkawinan dan juga mengenai budel warisan (Wirjono Prodjodikoro, 1960:147).

Selanjutnya pasal 463 menetapkan bahwa apabila seorang sudah bepergian selama sepuluh tahun maka suami

atau istri yang ditinggalkan itu dapat minta izin dari Pengadilan Negeri supaya yang bepergian itu dipanggil tiga kali berturut-turut.

Apabila panggilan-panggilan itu tidak berhasil, maka Pengadilan Negeri dapat mengizinkan suami atau istri yang ditinggalkan untuk kawin dengan orang lain (pasal 494 BW). Dengan dilakukannya perkawinan baru inilah maka perkawinan yang lama dianggap terputus. Hal ini sesuai dengan pasal 199 BW bahwa perkawinan itu bubar:

1. Karena kematian.
2. Karena keadaan tak hadir si suami atau si istri selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya atau suaminya.
3. Karena keputusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil.
4. Karena perceraian.

Mengenai putusnya perkawinan karena perceraian ada ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian, masing-masing pihak (suami dan istri) tidak dapat begitu saja datang ke Pengadilan dan minta agar perkawinannya dibubarkan,



tetapi harus ada alasan-alasan yang cukup kuat seperti yang telah ditentukan undang-undang, dan atas dasar alasan-alasan inilah para pihak dapat minta perceraian.

Alasan-alasan perceraian tersebut telah disebutkan secara limitatif dalam pasal 209 KUH Perdata, bahwa perceraian itu dapat terjadi karena alasan:

1. Zinah (overspal)
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan

Dari uraian di atas nampak bahwa salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 209 BW yaitu bahwa salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja (*kwaadwillige Verlating*). Jadi seorang istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan dengan alasan suami meninggalkannya dengan sengaja (tanpa alasan



seorang suami dengan sengaja memilih (sebuah) rumah sedemikian rupa sehingga tidak diharapkan dari pihak istri untuk bertempat tinggal di situ, maka juga dalam hal yang demikian itu suami dianggap menghalang-halangi kewajiban hidup bersama, maka istrilah yang berhak mengajukan cerai.

2. Harus sudah lima tahun berturut-turut berpisah atau meninggalkan yang lain. Jadi jangka waktu lima tahun tersebut harus berturut-turut. Kalau pada tiap-tiap kali ia pulang, maka keadaan semacam ini merupakan hal yang menghalang-halangi pengajuan gugatan.